SOSIOLOGIS AGAMA DALAM MASYARAKAT PLURALITAS

Hamzah Umasugi¹, Abd Rasyid M. Akib², Amirudin Yakseb³, Amaluddin⁴

^{1,3}STAI Babussalam Sula

²STAI YAMRA Merauke

⁴Universitas Muhammadiyah Pare Pare

Email : nyongkey19@gmail.com¹, rasydstit@gmail.com², suabaleha@gmail.com³,
amaluddin@umpar.ac.id⁴

ABSTRAK: Penulisan ini membahas agama dalam masyarakat pluralitas pada konsep sosiologis, paham pluralitas dengan didasarkan *Unity in Diversity* (Bhineka Tugal Ika) sebagai semboyan dimana menunjukkan bahwa keragaman dan perbedaan adalah sebuah rahmat. Agama sering dikaitkan sebagai identitas kelompok manusia dalam masyarakat, ini menunjukkan adanya pemisah dalam sebuah paham yang telah ada sejak lama. Sebagai sebuah sistem yang mengatur tata kehidupan dalam aspek kepercayaan, agama kerap kali menjadi alasan kelompok masyarakat tertentu sebagai dali kebenaran maupun kekuatan, olehnya banyak bermunculan konflik dimana-dimana. Melihat fenomena sosial dalam agama masyarakat plularitas, maka penulis mencoba menarasikannya dengan mendeskripsikan dalam berbagai sudut pandang menggunakan metode *library research* melalui pendekatan *fenomenologi*, kemudian beberapa masalah yang penulis angkat dan dirumuskan diantaranya; Bagaimana nilai pluralitas dalam interaksi antar agama, bagaimana kontribusi agama terhadap kohesi sosial dan faktor pemicu konflik, bagaimana peran pemerintah serta rekonsiliasi antar golongan dan agama. simpulannya dengan dialog lintas agama, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan juga lembaga pendidikan berguna sebagai sarana edukasi dalam membangun toleransi dalam suatu masyarakat pluralitas.

Kata Kunci: Sosiologis, Agama, Masyarakat

ABSTRACT: *This writing discusses religion in a pluralistic society based on sociological concepts, understanding plurality based on Unity in Diversity (Bhinneka Tugal Ika) as a motto which shows that diversity and differences are a blessing. Religion is often associated with the identity of human groups in society, this shows the existence of divisions in an understanding that has existed for a long time. As a system that regulates life in the aspect of belief, religion often becomes the reason for certain groups of society as a source of truth and strength, because of this many conflicts arise everywhere. Looking at social phenomena in the religion of plural society, the author tries to narrate it by describing it from various points of view using the library research method through a phenomenological approach, then several problems that the author raises and formulates include; What is the value of plurality in interactions between religions, what is the contribution of religion to social cohesion and factors that trigger conflict, what is the role of government and reconciliation between groups and religions. In conclusion, interfaith dialogue, social activities and educational institutions are useful as educational tools in building tolerance in a pluralistic society.*

Keywords: Sociology, Religion, Society.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah bangsa yang menghargai kemajemukan, ini menjadi sesuatu yang sangat bernilai dengan kekayaan budaya, adat, ragam suku, Bahasa dan agama. Keistimewaan ini patut disyukuri sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan. Kofi Annan” *Mungkin saja kita berlainan dalam hal keyakinan, bahasa maupun warna kulit, tapi semua kita berasal dari ras manusia yang sama.*”¹ Ungkapan ini jika kita gambarkan dalam konteks berbangsa dimana indonesia maka sudah barang tentu menjadi keniscayaan, sebab indonesia menjadi salah satu negara yang mempraktekannya. Saat ini pada masyarakat kita berbagai macam problem yang kerap kali muncul dan pada kebanyakan terjadi dilingkup sosial masyarakat, apakah tentang adat, budaya, identitas, dan juga agama, beragam corak paham serta perilaku masyarakat kitapun tentunya akan menjadi penghubung guna menjaga keharmonisan dalam sebuah masyarakat yang pluralitas.

Orang-orang digerakkan oleh roh dan raga; dalam ilmu sosial, paham individu berkaitan dengan tabiat dan kehidupan jiwa yang kompleks.² Sebagai makhluk pribadi tentunya memiliki kepekaan atas apa yang diperbuat baik untuk dirinya ataupun yang mengarah pada perilaku sosial, Hakikat manusia mendominasi manusia secara keseluruhan,³ ini mencerminkan bahwa kehidupan tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kehidupan lain yang mengajak untuk berinteraksi menemukan apa dan bagaimaimana perilaku sebagai manusia sesungguhnya, dikarenakan individu yang satu dengan lainnya memiliki perbedaan serta kekhasan masing-masing. Interaksi yang maksudkan tidak sekedar dipahami dalam lingkup induktif namun juga deduktif, sementara manusia berdasarkan kodratnya yakni sebagai makhluk tuhan dengan tanggungjawabnya memungkinkan untuk mengatur kehidupan bersama dalam tatanan masyarakat yang

¹ <https://www.merdeka.com/jateng/20-kata-kata-bijak-kofi-annan-tentang-perdamaian-penuh-makna-mendalam-klm.html>

² Drs Sujarwa, M.Hum. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar “Manusia dan Fenomena Sosial Budaya”*. Penerbit; Pustaka Pelajar. Cet. I, Agustus 2010. Hlm. 283

³ Prof. Dr. H. Jalaluddin & Prof. Dr. H. Abdullah Idi, M.Ed, *Filsafat Pendidikan “Manusia, Filsafat, dan Pendidikan*. PT. Rajagrafindo Persada. Cet. 9, Rajawali Pers, 2020 Hlm. 129

memungkinkan sebagai pondasi dalam menciptakan kebersamaan dan saling menghargai satu dengan lainnya. manusia tidak sekedar sebagai makhluk sosial namun juga makhluk budaya dan juga butuh orang lain dalam hidup keseharian.⁴ Pluralitas dalam masyarakat sebagai sebuah sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Ini berarti menerima dan menghormati keberagaman sebagai sesuatu yang positif dan memperkaya, bukan sebagai ancaman atau hambatan. Dalam qur'an al-Hujurat;13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya; Wahai manusia!aSungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. Qur'an; a (49);13

Dalam makna ayat ini, sangat jelas bahwa adanya nilai yang terkandung yakni keberagaman dalam suatu masyarakat sebagai bukti bahwa pentingnya kerukunan untuk saling kenal mengenal dan sungguh diantara mereka adalah orang yang bertakwa.

Secara sosial pluralitas pada dimensi agama merujuk pada keadaan di mana terdapat keberagaman keyakinan keagamaan, praktik, dan pemahaman tentang spiritualitas dalam suatu masyarakat. Pluralitas agama mencakup berbagai tradisi keagamaan, doktrin, ritual, dan institusi yang ada secara bersamaan dalam konteks sosial yang sama. Pluralitas agama membutuhkan adanya sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan agama. Ini mencakup kemampuan untuk menerima keyakinan dan praktik agama orang lain tanpa memaksakan keyakinan sendiri atau menekan kebebasan beragama. Persoalan sosial boleh dikata sering bermunculan dikarenakan pada masyarakat kita tanpa sadar dan berpikir panjang terkadang menampilkan sikap ke-egoisan dan ketidakpedulian antara sesama baik seagama ataupun berbeda agama, padahal dalam satu kelompok masyarakat pasti adanya interaksi yang dapat menguatkan keharmonisan sebagai bentuk kemajemukan dan menjadikan kita manusia yang beradab.

⁴ *Ibid.* Hlm. 134

Sikap demikianpun kerap menimbulkan kerenggangan dan bahkan menjadi penyebab munculnya konflik sosial, hal ini dikarenakan kurangnya nilai toleransi dan kebersamaan dalam satu pemahaman sebagai kelompok masyarakat yang saling membutuhkan, banyak fakta sosial yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat kita, mengapa? Masalah ketersinggungan dalam berbagai aspek menjadi faktor utama, semisal perdebatan antara ras, suku, agama. sikap ini muncul disebabkan sakit hati, dengki, merasa lebih benar dengan apa yang dipercayai. Ini jika kita letakan pada konteks masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat kita dalam keadaan tidak baik-baik (sakit) secara psikologis. dalam salah satu hadits yang di sampaikan oleh Nabisaw; *ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, baiklah seluruh tubuh, sebaliknya apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu hati (HR. Al-bukhari & Muslim).*

Makna dalam hadits ini, menggambarkan bahwa peran hati sangat krusial,⁵ hati dapat dimaknai dalam konteks kejiwaan dimana seorang yang dapat mengendalikan kejiwaannya maka ia akan mampu menghadapi berbagai masalah baik dalam hidup serta kehidupannya. Saat ini bangsa kita diperhadapkan dengan krisis pada dimensi sosial, bahkan berbagai macam strategi kerap dilakukan oleh pemerintah sekedar mengantisipasi terjadinya gejolak pada masyarakat yang berimplikasi terjadinya kekerasan fisik antar umat, golongan dan sebagainya. Padahal semua itu terkesan hanya kamufase, mengapa? Banyak fakta yang perlu dikaji dimana masyarakat kita dibuat terkotak-kotak dengan aksi tak malu-malu bahkan tidak merasa bersalah. Muhyidin Albarobis dalam bukunya *Mendidika Generasi Bangsa*, beliau mengatakan ada enam kerusakan yang diidap bangsa ini⁶ dimana segala aturan dan keputusan dibuat demi kemaslahatan umum, nyatanya sekedar memainkan peran seolah sebuah drama yang di design, beberapa fakta sosial; kerusuhan Mei tahun 1998 yakni adanya penolakan terhadap masyarakat tionghoa yang mengakibatkan terjadinya tindakan amoral bahkan korban jiwa, konflik NTB antar suku, Maluku (Ambon) agama, sampit. Tentunya dengan berbagai gejolak ini menjadi

⁵ Prof. Sutrisno dan Muhyidin Albarobis, *Pendidikan Islam Berbasis Problem Sosial*. Penertbi; AR-RUZZ MEDIA. Cet. I, 2012. Hlm. 77

⁶ Ibid, Hlm. 81-82

iktiyar bangsa dalam meminimalisir kiranya fakta-fakta ini tidak akan terulang sehingga nilai kebinekaan yang telah dianut sejak lama akan selalu melekar sebagai bangsa yang menjunjung perbedaan dengan makna hakiki.

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana nilai pluralitas dalam interaksi antar agama?
2. Bagaimana kontribusi agama terhadap kohesi sosial dan faktor pemicu konflik?
3. Bagaimana peran pemerintah serta rekonsiliasi antar golongan dan agama?

b. Tujuan

1. Mendeskripsikan nilai pluralitas dalam interaksi antar agama?
2. Mendeskripsikan kontribusi agama terhadap kohesi sosial dan faktor pemicu konflik?
3. Mendeskripsikan peran pemerintah serta rekonsiliasi antar golongan dan agama?

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode *library research* yang mana penulis mengumpulkan data pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber berupa buku, artikel jurnal dan juga bentuk penelitian lain yang relevan dengan masalah, kemudian penulis mendeskripsikan melalui pendekatan *fenomenologi* sebagai pisau analisis guna melihat fakta dengan cara mendeskripsikan fakta sosial dari segi teoritis maupun historis.

Prof. Sugiono; penelitian kepustakaan (*library research*) adalah jenis penelitian di mana data tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, tetapi dari perpustakaan atau sumber lain yang menyimpan dokumen dan referensi yang berisi data yang telah divalidasi. Oleh karena itu, hasil penelitian kepustakaan disebut sebagai data sekunder.⁷ Adapun penulis menggunakan pendekatan fenomenologi sebagai bagian dari metode kualitatif yakni, untuk mendeskripsikan fenomena yang ada pada masyarakat pluralitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

⁷ Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan*. Edisi Ke-3, Cet Ke 2, April 2021. Hlm. 14

1. Pluralitas dalam Interaksi Agama

Menyikapi dinamika masyarakat saat ini sangat beragam, dapat kita lihat dalam kehidupan keagamaan. Indonesia sebagai salah satu negara yang memberikan ruang bagi warga negara dalam menyikapi nilai-nilai kebebasan salah satunya pluralitas. Pluralitas berasal dari kata dasar plural, yang berarti jamak atau lebih dari satu. Dalam konteks sosiologi, pluralitas merujuk pada keadaan masyarakat yang majemuk.⁸ Inilah yang menyebabkan terjadinya interpretasi pada masyarakat kita dalam mengartikan pluralitas dengan mempraktekan paham pluralisme dalam kehidupan sosial saat ini. Bernegara tidak sekedar dimaknai dalam konteks yang bersifat sempit namun universal, sebagai contoh kebebasan membangun rumah ibadah umat kristen, katolik, hindu dan budha (*Peraturan Bersama Menteri (PBM) dalam Negeri dan Menteri Agama No. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah*).⁹ Adapun keinginan terhadap pengakuan kemajemukan dalam konteks menghargai berupa pengucapan selamat natal dan tahun oleh agama lain, menjaga kenyamanan tidak mengusik (azan/TOA) dan banyak hal serupa lainnya pada masyarakat minoritas (agama) di indonesia, mereka menginginkan bahwa kebebasan sosial tidak dibatasi hanya dalam peribadatan namun dari aspek sosial lain haruslah terimplementasi dalam kehidupan bermasyarakat yang plural dan terpisah bahkan terlihat normal dimana setiap agama terkotak-kotak namun harus bersatu dalam toleransi.

Masyarakat kita saat ini berada pada kehidupan modernisasi yang tak kalah dengan negara-negara kawasan asia, perubahan dalam berbagai aspek sebagai bagian kebutuhan serta keterpenuhan akan fasilitas telah menjadi hal yang lumrah dimata masyarakat indonesia. Namun semua itu tidak membantu negara melahirkan instrumen-instrumen terbaik untuk melahirkan masyarakat guna memaknai sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Mengapa? Keinginan akan hidup sebagai masyarakat merdeka terkesan sekedar semboyan belaka dan telah melekat pada setiap sendi-sendi kehidupan sosial. Merdeka dalam makna luas dapat diartinya sebagai kebebasan, akan tetapi berbeda jika dilihat dalam konteks kebangsaan. Pembatasan atas hak-hak masyarakat banyak

⁸<https://www.cnnindonesia.com/ed.ukasi/20240108143304-569-1046747/pengertian-dan-contoh-pluralitas-dalam-kehidupan-masyarakat>. diakses; 9 mei 2024

⁹<https://kepri.kemenag.go.id/page/det/pendirian-rumah-ibadah-harus-sesuai-dengan-aturan-dan-perundang-undangan-yang-berlaku>. diakses; 22 mei 2024

dijumpai dinegara ini, sebut saja “Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945, Pasal 23 Ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Angka 1 UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum”¹⁰, dan masih banyak lagi.

Pada praktek sosial! sebagai kelompok dalam suatu masyarakat yang berbeda dari segi bahasa, budaya, adat, ras, suku, dan agama, juga diperhadapkan pula dengan berlakunya paham pluralitas sebagai bentuk implementasi nilai kebhinekaan, jika demikian perlu kiranya penguatan terhadap bagaimana menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian antar sesama yang tidak sekedar bersifat statis sebagaimana diberlakukan norma-norma, namun dapat dikuatkan dengan tindakan nyata (*real ecstion*), maka perlu adanya design kongkrit oleh pemerintah sehingga dengan adanya design yang dikhususnya guna menjadi solusi sehingga terpelihara paham pluralitas yang dapat diterima dan bisa terpraktekan tanpa ada pengecualian, langka yang dapat diambil yakni adanya penguatan melalui lembaga-lembaga pendidikan dengan penerapan pengetahuan nilai-nilai moral (*special knowledge*) pendidikan khusus, yang dilakukan terus-menerus secara kesinambungan. Dalam Qur’an surah Al-Ra’du, 13;11

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Terjemahan; Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dari ayat diatas bahwa Allah tidak akan merubah kehidupan suatu kaum kecuali merekalah yang dapat merubah sesuai keinginannya, jika ditelaah dalam makna sosial atau masyarakat, maka perubahan yang dilakukan oleh manusia baik budaya, adat dan sebagainya menjadi bagian dari sunatullah yang dilakukan manusia. Perubahan yang dimaksudkan adalah sesuatu yang dilakukan dengan sebaik-baiknya dan bukan dalam

¹⁰Gresnews, *Dasar Hukum Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum*. 2014. <http://www.gresnews.com/berita/tips/87156-dasar-hukum-kemerdekaan-berpendapat-di-muka-umum/> / (diakses 26 mei 2024)

makna kerusakan, permusuhan. Sehingga dapat mencerminkan adanya hubungan dalam kebersamaan antar sesama manusia, sebagaimana wahyu Allah SAW;

Terjemahan; "Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan diantara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian diantara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang berima tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki kejalan yang lurus." (QS.Al-Baqarah:213)

Ayat ini memberikan suatu pemahaman bahwa keragaman dalam kelompok masyarakat (manusia) adalah satu dan yang membedakan hanya pada bentuk keyakinan (aqidah) dengan adanya kitab, namun terdapat petunjuk bahwa Allah SAW menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan.

2. Kontribusi Agama

Pluralitas agama di Indonesia, telah memberikan ruang pada setiap kelompok keagamaan untuk melaksanakan aktifitas peribadatan sesuai keyakinan masing-masing dan telah diatur dalam konstitusi negara. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekuatan dalam perspektif kemajemukan agama. hingga kini praktek keagamaan di Indonesia berpedoman hanya dengan UUD 1945 dan pada sila Pancasila sebab, sampai saat ini belum adanya sebuah ketentuan baku pendefinisian agama secara hirarki. Kontribusi agama sudah ada sejak masa kolonial dimana fakta sejarah bahwa hasil kemerdekaan bangsa ini tidak diperankan atau diperjuangkan oleh agama tertentu akan tetapi semua agama dan pula melibatkan suku, begitupun ras.

Berbicara terkait kontribusi agama sangatlah urgen, mengapa? agama dalam makna luas mengajarkan setiap pemeluknya untuk mengatur dan membentuk pola hidup yang mengarah pada perbuatan baik antar sesama pemeluk agama. Agama dalam kontribusinya sudah sangat jelas jika setiap pemeluk agama dapat dan mampu hidup berdampingan dengan perbedaan dalam keseragaman, maka tentunya hal-hal yang berbau

keterseinggungan, pertikaian, perpecahan tidak akan timbul, bahkan akan memunculkan suatu kehidupan yang harmonis dalam suatu kerukunan antar manusia. Agama menjadi landasan spritualitas dimana mengarahkan manusia untuk dapat hidup berdampingan dalam suatu lingkup sosial, dan menjadi pedoman dalam rana kemajemukan. Dari sinilah agama akan dapat memainkan peran sebagai bentuk kontribusi dalam pembangunan bangsa, adanya sumbangsi agama dalam memainkan perannya masing-masing dari setiap sektor pembangunan dapat ditemukan pada beberapa aspek diantaranya pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, dan politik.

a. Kohesi Sosial

Sejak indonesia merdeka, berbagai kebijakan negara dibuat untuk mengelola kemajemukan agama (keyakinan), namun untuk membuat kebijakan sebagai tata kelola kemajemukan ini tidaklah mudah. Dalam islam sendiri praktek keyakinan banyak perbedaan dalam paham (alira-aliran) dan juga pada beberapa agama lain. Adapun tujuan kebijakan untuk memberikan rasa aman dalam praktek keyakinan yang tidak lagi menimbulkan kekawatiran diantara pemeluk agama. Tentu perlu dipahami bahwa indonesia tidak dikenal sebagai *nation state* bukan *religios state* dalam merumuskan dan memproklamirkan bangsa ini.¹¹ Karakteristik masyarakat bangsa ini dibangun diatas pondasi kemajemukan sehingga secara holistik keberagaman dalam konteks persatuan dan kesatuan menjadi suatu kekuatan besar dalam membangun bangsa ini yang dimulai dari adanya ketergantungan antar individu khususnya dan secara umum pada lingkup masyarakat. Sebagaimana Durkheim dalam Berkman & Kawachi mendefinisikan kohesi sosial sebagai ciri masyarakat yang menunjukkan adanya saling ketergantungan antar individu dalam masyarakat tersebut, seiring Berkman & Kawachi juga mengungkapkan bahwa sejalan dengan kohesi sosial terdapat beberapa aspek yakni, (1) tidak adanya konflik sosial laten (konflik apa pun yang didasarkan pada kekayaan, etnis, ras, dan gender) dan (2) adanya ikatan sosial yang kuat (misalnya masyarakat sipil, demokrasi responsif, dan penegakan hukum yang tidak memihak).¹²

¹¹ <https://geotimes.id/opini/agama-negara-dan-kohesi-sosial/> diakses; 30 Mei 2024

¹² Innovation: *The European Journal of Social Science Research*, 2019 Vol.32,No.2,231–253, <https://doi.org/10.1080/13511610.2018.1497480>. Hlm. 233

Dalam tatanan masyarakat plural, penting kiranya kolaborasi dalam berbagai aspek sebagai cikal bakal lahirnya kohesi sosial yang menghubungkan antara unsur yang satu dengan lainnya sehingga dapat menguatkan nilai persatuan tanpa diskriminasi, menjunjung harkat martabat, komitmen sebagai satu kelompok masyarakat dalam suatu bangsa, partisipatif dalam pembangunan bangsa, serta kokoh dalam menjalin persatuan.

b. Faktor Pemicu Konflik

Pertumbuhan serta perkembangan manusia di zaman ini menuntut banyak hal yang diperhadapkan termasuk dari segi sosiologis, dalam pribadi manusia baik jasmaniah maupun rohaniah terdapat beberapa bagian yang berbeda sebagai kondisi yang menjadikan manusia berubah ke arah kesempurnaan. Ungkapan M. Dalyono dalam *Psikologi Pendidikan* “ada dua bagian kondisional pribadi manusia yakni; bagian pribadi bersifat materil yang kuantitatif, dan pribadi fungsional bersifat kualitatif. Bagian pribadi materil yang kuantitatif ialah mengalami pertumbuhan, sedangkan bagian fungsional kualitatif berupa mengalami perkembangan.¹³ Dari uraian ini, maka pertumbuhan maupun perkembangan manusia akan dapat mempengaruhi lingkungan dimana mereka tinggal serta dapat menjalani dengan menciptakan nilai normatif dalam satu lingkup masyarakat.

Melihat fenomena sosial yang ada saat ini, kita melihat kondisi masyarakat yang rapuh dan memprihatinkan. Banyak terjadi kondisi penyimpangan dimasyarakat, penyimpangan norma sosial, norma agama, norma hukum, norma budaya, dan sebagainya. Rasa kepedulian untuk hidup berdampingan bersama dengan saling menghormati dan mengakui perbedaan masing-masing sudah menghilang. Maka akibat yang timbul adalah perpecahan ditubuh masyarakat dan terganggunya rasa aman dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang plural dan majemuk ini tentunya diharapkan mampu menyikapi akulturasi untuk dapat berkembang secara adaptif sesuai zaman yang juga terus berkembang, *Furnival dalam Robert W. Hefner* masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari “dua atau lebih elemen

¹³ Drs. M. Dalyono, *Psikologi Pendidikan*, Dit. PT. RINEKA CIPTA. Cet. 7 Jakarta; Rineka Cipta, 2012. Hlm. 61

atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tanpa membaaur, dalam satu unit politik”¹⁴

Faktor terjadinya konflik sangat beragam pada kehidupan masyarakat kita yang plural, beberapa fakta konflik bisa kita temui dimedia masa maupun media cetak. Konflik atau pertikaian yang dialami bangsa ini dalam konteks sosial masyarakat ada yang disebabkan faktor agama, budaya, ras, suku, dan ada pula dikarenakan selisih paham dalam sebuah pilihan politik. Beberapa konflik dan faktornya; 1. Konflik Poso; faktor agama, pertikaian muslim pendatang dengan etnis protestan, 2. Konflik 1998 di ibu kota; penolakan ras tionghoa, 3. Konflik pengusiran papua di yogyakarta; faktor rasisme, 4. Konflik Ambon 1999-2002 (maluku); faktor individu yang mengarah pada agama, 5. Konflik Sulut 2023; faktor, suku dan kultur. Adanya faktor penyebab konflik pada masyarakat, umumnya timbul karena adanya perbedaan dalam suatu kelompok masyarakat yang tidak terakomodasi sehingga menimbulkan gesekan-gesekan yang mengarah pada tindakan fisik. Istilah “conflict” dalam bahasa aslinya mempunyai arti sebagai perkelahian, peperangan, dan perjuangan yang berbentuk konfrontasi fisik antara beberapa pihak.¹⁵ adapun perbedaan latar belakang yang menciptakan kondisi masyarakat tertentu sehingga mudah terpengaruh dengan pola pemikiran maupun hasutan-hasutan bahkan pendirian berbeda yang kemudian menjerumuskan kearah terjadinya konflik.

3. Peran Pemerintah

Peran pemerintah dalam memberikan kontribusi kepada setiap pemeluk agama saat ini sangat urgen, sebab jika pemerintah sekedar melihat atau mendorong satu agama tertentu dalam upaya pembangunan ataupun memberikan kebebasan dari segi implementasi yang mengarah pada diskriminasi maka akan berpengaruh pada ketidakadilan sosial sebagai bangsa yang menganut azas kebhinekaan. Beberapa peran pemerintah yang harus menjadi perhatian dalam kontribusinya terhadap agama yakni;

¹⁴ Robert W. Hefner, *Politik Multikulturalisme “Menggugat Realitas Kebangsaan”*. Penerbit Kanisus; Cet. 5. Tahun 2012. Hlm.16-17

¹⁵ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin

memberikan perlindungan kebebasan beragama, pengaturan dan registrasi, pendidikan, pemeliharaan warisan budaya dan sejarah, menyelenggarakan acara keagamaan. Dengan peran pemerintah ini, telah memberikan kontribusi langsung sebagai varian dalam memainkan perannya sehingga tidak memunculkan imej negatif dari kalangan agama tertentu dan berdampak positif demi kemajuan bangsa.

Disatu sisi pemerintah telah mengakui pluralitas, disisi lain pemerintah juga harus menyediakan payung hukum sebagai legitimasi kepada setiap agama untuk mengambil bagian dalam pembangunan serta dalam mengatur perilaku beragama masyarakat sesuai ajaran tanpa diskriminasi. Bila dikaitkan dalam perspektif antropologi maka penting melihat dari sudut pandang atau polarisasi kehidupan masyarakat (manusia) jika disatukan dalam lingkungan heterogen. Maksud dari perspektif antropologi dapat dipelajari sebagai sistem pengawasan sosial yang menjaga peraturan dalam masyarakat. Donald Black mengatakan: “Anthropologist have similarly concentrated on what they regards as law-typically the most formal and dramatic aspects of social control in tribal and other simple societies although this often includes non-governmental as well as governmental process”¹⁶. Olehnya, implikasi hukum negara akan memiliki kecenderungan untuk menghapuskan, mengabaikan, dan mendominasi keberadaan sistem hukum yang lain, karena disadari atau tidak hukum berfungsi sebagai kontrol sosial pemerintah (*governmental social control*)¹⁷ atau sebagai *the servant of repressive power*¹⁸ atau sebagai *the command of a sovereign backed by sanction*.¹⁹

a. Rekonsiliasi antar Golongan

Rekonsiliasi antar agama bukanlah proses yang mudah, namun dengan komitmen bersama dari berbagai pihak dan upaya yang berkelanjutan, masyarakat dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan damai antar agama. Untuk memberikan rasa aman dalam keberagaman, maka perlu adanya pelibatan semua unsur baik pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, lembaga maupun organisasi keagamaan untuk mendorong menciptakan kerjasama. Sudarmono dalam Defano

¹⁶ Donald Black, *Toward a general theory of social control*, Hlm. 35.

¹⁷ Donald Black, *The behaviour of law*

¹⁸ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and society in transition, toward responsive law*, Harper Colophon Books, 1978.

¹⁹ H. Mc. Coubrey and Nigel D. White, *Textbook on jurisprudence*, Blackstone Press Limited, 1996

Tanur dkk. “*terjadinya konflik dalam masyarakat dikarenakan banyak perbedaan dan keragaman kelompok, sehingga akan rentan terjadinya cekcok dan pertentangan yang dapat dilakukan, pendekatan yang dapat dilakukan yaitu menumbuhkan serta membangun rasa toleransi antara masyarakat dan memperkuat komunikasi antar sesama, sehingga masyarakat dapat memahami keberagaman yang ada*”.²⁰

Dengan demikian, patut pelibatan pemerintah dalam rekonsiliasi guna menyatukan paham kelompok atau golongan sebagai sarana mendamaikan konflik ditengah masyarakat dalam berbagai bentuk, yakni komunikasi, konsolidasi, serta dapat memberikan keadilan tanpa adanya kepentingan terhadap kelompok atau golongan tertentu.

b. Rekonsiliasi antar Agama

Samahalnya rekonsiliasi golongan, pada rekonsiliasi agama juga perlu adanya pendekatan-pendekatan secara holistik guna mengetahui akar permasalahan yang menjadi pemicu konflik antar agama, kemudian mencari solusi penyelesaian dengan mengedepankan azas keadilan tanpa diskriminasi. Meskipun terdapat perbedaan dalam penekanan dan praktik antara agama-agama, nilai-nilai rekonsiliasi yang mendasar pada akhirnya menciptakan landasan yang kuat untuk membangun perdamaian dan harmoni di antara umat manusia. Beberapa langkah rekonsiliasi yang dapat digunakan diantaranya; pengampunan atau pemberian maaf guna menghilangkan kebencian atas kesalahan, upaya memberikan keadilan sebagai prasyat berdamai, penghormatan dari segi perbedaan yaitu mengakui serta menghargai perbedaan dalam keberagaman sebagai keniscayaan, Hans Kung dalam Basyir S, mengemukakan suatu agama dikatakan benar dan baik bila sejauh agama itu manusiawi, tidak menghilangkan, menghancurkan kemanusiaan melainkan melindungi dan memajukannya.²¹ sehingga penting rekonsiliasi dapat dijadikan sebagai *mission sacree* Dimana kehadiran agama serta pemeluknya dapat

²⁰ Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa Vol.2, No.3 Agustus 2023 e-ISSN: 2963-5438; p-ISSN: 2963-5004, Hal 206-218 DOI: <https://doi.org/10.58192/insdun.v2i3>. Hlm. 210

²¹ <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tabligh/article/view/6023/5195> diakses; 01 Juni 2024

menciptakan kedamaian, dan dalam situasi konflik tugas agama adalah memberikan kedamaian bukan menciptakan konflik.

Hasil

Menyikapi pluralitas dalam masyarakat dari segi sosiologis melibatkan banyak pemahaman tentang bagaimana bersatu dalam kelompok. Maka dalam membangun kesadaran masyarakat untuk tidak terjadinya gejolak dan meminimalisir, peran pemerintah serta stakeholder lainnya kiranya dapat menyatukan gagasan guna mencari solusi dalam memberikan rasa aman serta kepedulian kearah ini, dengan menghadirkan sebuah kebijakan yang relatif disandarkan atas kepentingan umum, dan mampu melihat setiap dinamika sosial dimasyarakat maupun tantangan yang kerap dihadapi. Sebagai solusi guna menghindari terjadinya penafsiran dalam memaknai pluralitas, perlu kiranya strategi untuk mencegah adanya konflik diantara; 1. Membangun komunikasi yang efektif antar pemeluk agama dengan melibatkan institusi keagamaan, organisasi, tokoh/pemuka agama. 2. Menciptakan kohesi sosial dalam keberagaman agama, budaya serta perilaku individu. 3. Memberikan suatu kepastian hukum sebagai kebijakan tegas dalam memberikan sanksi kepada yang berkonflik. 4. Membangun nilai-nilai persatuan secara fundamental pada kalangan masyarakat dilevel atas, menengah maupun bawah. 5. Memberikan legitimasi kepada tiap-tiap pemeluk agama dalam menjalankan keyakinan sesuai ajarannya tanpa mendiskreditkan agama lain.

Bila hal diatas dapat terimplementasi pada masyarakat kita dan teraktualisasi, bisa dipastikan setiap gejolak maupun pertikaian baik antar agama, budaya, ras, suku, maupun golongan akan semakin terkendalikan. Dalam ajaran islam diterangkan sebagaimana surat al-Kafirun ayat 1-6; *“aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.* (Q.S; Al-Kafirun 109;1-6)

Demikian, jelas bahwa pluralitas dapat terjadi sebagai makna dari hubungan antar manusia satu dengan lainnya dalam beragama, tetapi ada pengecualian dalam konsep normatif dimana agama dipahami sebagai suatu praktek keyakinan yang terpatri pada setiap pemeluknya dan tidak parsial (umum/keseluruhan), bahkan masih saja bermunculan narasi justifikasi. Menurut Nurcholish Madjid dalam tipologi sikap

beragama, yang mana agama dipahami secara eksklusif; sikap yang eksklusif ini ketika melihat agama bukan agamanya, agama-agama lain adalah jalan yang salah, yang menyesatkan bagi para pemeluknya. Paradigma ini merupakan pandangan yang dominan dari zaman ke zaman dan terus dianut hingga dewasa ini : “*Agama sendirilah yang paling benar; yang lain salah*”²² namun jika dihubungkan pada sikap inklusif maka akan menemukan benang merahnya sesuai makna ayat diatas

KESIMPULAN

Masyarakat pluralitas ditandai dengan adanya keberagaman yang mencerminkan kompleksitas sosial dimana memungkinkan bisa mempengaruhi interaksi individu dan kelompok. Olehnya, penting disikapi secara serius sebagai tantangan dalam memupuk kebersamaan sehingga dengan kemungkinan-kemungkinan akan dapat meminimalisasi adanya gesekan yang mengarah pada terjadinya tindakan kekerasan kelompok-kelompok tertentu. Dialog lintas agama, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan juga lembaga pendidikan berguna sebagai sarana edukasi dalam membangun toleransi dalam suatu masyarakat pluralitas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Idi H & Jalaluddin H, *Filsafat Pendidikan "Manusia, Filsafat, dan Pendidikan*.

PT. Rajagrafindo Persada. Cet. 9, Rajawali Pers, 2020

Dalyono M, *Psikologi Pendidikan*, Dit. PT. RINEKA CIPTA. Cet. 7 Jakarta; Rineka Cipta, 2012.

Innovation: *The European Journal of Social Science Research*, 2019 Vol.32,No.2,231–253, <https://doi.org/10.1080/13511610.2018.1497480>.

Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa Vol.2, No.3 Agustus 2023 e-ISSN: 2963-5438; p-ISSN: 2963-5004, Hal 206-218 DOI: <https://doi.org/10.58192/insdun.v2i3>.

²² <https://uinsgd.ac.id/tipologi-sikap-beragama/> diakses, 01 Juni 2024

Muhyidin Albarobis dan Prof. Sutrisno, *Pendidikan Islam Berbasis Problem Sosial*.

Penerbit; AR-RUZZ MEDIA. Cet. I, 2012

Nigel D and H. Mc. Coubrey. White, Textbook on jurisprudence, Blackstone Press

Limited, 1996

Philip Selznick and Philippe Nonet, Law and society in transition, toward responsive law,

Harper Colophon Books, 1978.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan*

Penelitian Pendidikan. Edisi Ke-3, Cet Ke 2, April 2021

Sujarwa, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar “Manusia dan Fenomena Sosial Budaya”*.

Penerbit; Pustaka Pelajar. Cet. I, Agustus 2010

W. Hefner Robert, *Politik Multikulturalisme “Menggugat Realitas Kebangsaan”*.

Penerbit Kanisus; Cet. 5. Tahun 2012